FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TESIS

YUDA SAPUTRA
NIM B2092241009

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Yuda Saputra
NIM	:	B2092241009
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan tesis dengan judul tersebut di atas.

Pontianak, 26 Januari 2026



Yuda Saputra
B2092241009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yuda Saputra
NIM	:	B2092241009
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Akuntansi.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak, 26 Januari 2026



Yuda Saputra
B2092241009

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

ini diajukan oleh:

Nama	: Yuda Saputra
NIM	: B2092241009
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	: 26 Januari 2026

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, AseanCPA NIP. 196306301990021001	13/02/2026	
Pembimbing II	Umiaty Hamzani, SE, M.Com, Ph.D NIP. 198012182003122001	11/02/2026	
Penguji I	Dr. Muhsin, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, AseanCPA NIP. 197210012006041001	10/02/2026	
Penguji II	Dr. Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 197906182002122003	06/02/2026	

Pontianak, 20 Februari 2026

Mengetahui

Koordinator Prodi Magister Akuntansi

Elok Heniwati, SE., M.Si, Ak, Ph.D, CA

NIP. 197402122000122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia- Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Sustainability* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat". Tesis ini merupakan karya tulis yang sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, guna meraih gelar Magister (S2).

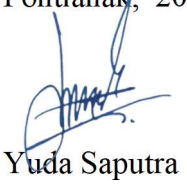
Selama penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, arahan, serta petunjuk teknis dari berbagai pihak yang sangat membantu dalarn perkembangan penulisan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Barkah, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
3. Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi.
4. Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, Asean CPA selaku dosen pembimbing utama tesis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
5. Umiaty Hamzani, SE, M.Com, Ph.D selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Dr. Muhsin, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, AseanCPA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini.

7. Dr. Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta seluruh staff administrasi Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
9. Orang tua tercinta Almh. Suyati dan Supardi yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, pendidikan, dukungan, motivasi, doa dan cinta serta kasih sayang yang sangat besar demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
10. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada istri tercinta, Happy Tiara Muslimah, yang senantiasa memberikan doa, cinta, kesabaran, dan dukungan yang tulus selama proses penyusunan tesis ini. Keikhlasan, pengorbanan, serta semangat yang selalu diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan studi ini. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua buah hati tercinta, Khadijah Yasmine Almahira dan Muhammad Syafiq Alhaziq, yang kehadirannya menjadi penyemangat terbesar dan sumber kebahagiaan dalam setiap langkah perjuangan. Senyum, doa, dan ketulusan kalian menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab, pengabdian, dan persembahan penulis bagi keluarga tercinta.
11. Teman-teman mahasiswa Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan XXI atas persahabatan yang penuh dengan rasa kekeluargaan, sumbangan pikiran dan pengalaman selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut membantu sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian telah memberikan manfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semua saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Pontianak, 20 Januari 2026



Yuda Saputra

ABSTRAK

Financial sustainability merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang serta memastikan kesinambungan pelayanan publik. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab agar kondisi keuangan daerah tetap stabil. Pengelolaan keuangan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang dapat mengganggu keberlanjutan keuangan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi financial sustainability menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran, kemandirian keuangan, tingkat utang, dan solvabilitas anggaran terhadap *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2021–2023. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 14 daerah, sehingga diperoleh sebanyak 42 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran, kemandirian keuangan, dan tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah, sedangkan solvabilitas anggaran tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan utang yang hati-hati merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Kata Kunci : *financial sustainability*, efisiensi anggaran, kemandirian keuangan, tingkat utang, pemerintah daerah.

ABSTRACT

Financial sustainability is an important indicator in assessing the ability of local governments to maintain long-term fiscal sustainability and ensure the continuity of public service delivery. Local governments are required not only to increase revenue but also to manage public finances efficiently, transparently, and responsibly to maintain fiscal stability. Suboptimal financial management has the potential to create fiscal pressure that may threaten regional financial sustainability in the future. Therefore, analyzing the factors that influence financial sustainability is essential.

This study aims to analyze the effects of budget efficiency, financial independence, debt level, and budget solvency on the financial sustainability of regency and city governments in West Kalimantan. This research employs a quantitative approach using secondary data sourced from Local Government Financial Statements (LKPD) audited by the Audit Board of Indonesia (BPK) during the 2021–2023 period. The research population includes all regency and city governments in West Kalimantan , totaling 14 regions, resulting in 42 observations. Data analysis was conducted using panel data regression with the assistance of SPSS version 27.

The results indicate that budget efficiency, financial independence, and debt level have a significant effect on the financial sustainability of local governments, while budget solvency does not have a significant effect. These findings emphasize that expenditure control, optimization of local own-source revenue (PAD), and prudent debt management are key factors in maintaining regional financial sustainability.

Keywords: financial sustainability, budget efficiency, financial independence, debt level, local government.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Kontribusi Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Teori Neo-Institusionalisme 6

2.1.2 Teori Legitimasi 7

2.1.3 *Financial sustainability* 8

2.1.4 Efisiensi Anggaran 11

2.1.5 Kemandirian Keuangan 14

2.1.6 Tingkat Utang 16

2.1.7 Solvabilitas Anggaran 18

2.2 Penelitian Terdahulu 20

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 57

2.3.1 Pengaruh efisiensi anggaran terhadap *financial sustainability* 57

2.3.2 Pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial sustainability* .58

2.3.3 Pengaruh tingkat utang terhadap *financial sustainability* 59

2.3.4 Pengaruh solvabilitas anggaran terhadap *financial sustainability* .. 60
BAB III METODE PENELITIAN 62
3.1 Bentuk Penelitian 62
3.2 Data 62
3.3 Populasi dan Sampel 62
3.4 Variabel Penelitian 62
3.5.1 Variabel Dependen 63
3.5.2 Variabel Independen 63
3.6 Metode Analisis Data 68
3.6.1 Analisis Regresi Data Panel 68
3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif 69
3.6.3 Uji Normalitas 69
3.6.4 Uji Multikolinearitas 69
3.6.5 Uji Heteroskedastisitas 70
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 70
BAB IV PEMBAHASAN 71
4.1 Hasil Penelitian 71
4.1.1 Statistik Deskriptif 71
4.1.2 Uji Normalitas 73
4.1.3 Uji Multikolinearitas 76
4.1.4 Uji Heteroskedastisitas 77
4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 79
4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda 80
4.2 Pembahasan 82
4.2.1 Pengaruh efisiensi anggaran terhadap *financial sustainability* 83
4.2.2 Pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial sustainability* 86

4.2.3 Pengaruh tingkat utang terhadap *financial sustainability* 88
4.2.4 Pengaruh solvabilitas anggaran terhadap *financial sustainability*. . 90
BAB V PENUTUP 93
5.1 Kesimpulan 93
5.2 Keterbatasan Penelitian 94
5.3 Rekomendasi 95
DAFTAR PUSTAKA 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel..... 66
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 71
Tabel 4. 2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 73
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas..... 76
Tabel 4. 4 Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 79
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual 61
Gambar 4. 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 74
Gambar 4. 2 Histogram Regression Standardized Residual 75
Gambar 4. 3 Diagram Sebaran 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah, sebagai entitas yang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah, memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan warga melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (UU No. 23 Tahun 2014). Sesuai dengan kerangka desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten dan kota diberikan hak yang luas dalam mengelola sumber daya serta keuangan daerahnya (UU No. 23 Tahun 2014). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mencakup wewenang administratif tetapi juga aspek fiskal, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah (Halim, 2012). Namun, hak tersebut juga disertai dengan berbagai tantangan yang rumit, terutama dalam pengelolaan keuangan yang memerlukan akuntabilitas, transparansi, dan prinsip keberlanjutan (Mikesell, 2011).

Salah satu isu yang paling krusial dalam konteks tersebut adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga *financial sustainability* atau keberlanjutan keuangan (IFAC, 2014). *Financial sustainability* dapat dimaknai sebagai kondisi ketika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangan, mendukung penyediaan layanan publik, dan melaksanakan pembangunan jangka panjang tanpa menciptakan risiko fiskal yang berlebihan (IFAC, 2014). International Federation of Accountants menegaskan bahwa *financial sustainability* merupakan kapasitas entitas sektor publik untuk secara konsisten menjalankan program dan layanan publik dengan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia dalam jangka pendek maupun jangka panjang (IFAC, 2014). Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut tidak hanya fokus pada efisiensi pengelolaan anggaran tahun berjalan, tetapi juga memperhatikan implikasi fiskal terhadap generasi mendatang (Rodríguez Bolívar et al., 2014).

Dalam konteks global, upaya menjaga *financial sustainability* pemerintah daerah sejalan dengan penerapan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (IFAC, 2014). IPSAS dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan pada entitas sektor publik, termasuk pemerintah daerah (IFAC, 2014). Penerapan IPSAS mendorong penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang lebih komprehensif sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan, kewajiban jangka panjang, serta potensi risiko fiskal (IFAC, 2014). Dengan informasi keuangan yang lebih andal, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan fiskal jangka panjang secara lebih baik, termasuk dalam mengantisipasi kewajiban kontinjensi, mengelola utang, dan menjaga solvabilitas anggaran (Marlowe et al., 2009). IPSAS juga memperkuat peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah sehingga mendukung legitimasi dan keberlanjutan fiskal (IFAC, 2014).

Konsep *financial sustainability* sejalan dengan prinsip intergenerational equity atau keadilan antar generasi (Rodríguez Bolívar et al., 2014). Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menggunakan sumber daya keuangan secara berlebihan pada periode tertentu sehingga menimbulkan beban fiskal bagi generasi berikutnya (Rodríguez Bolívar et al., 2014). Evaluasi terhadap *financial sustainability* menjadi penting karena fokus berlebihan pada kepentingan jangka pendek berpotensi mengancam kelangsungan pelayanan publik di masa depan (Rodríguez Bolívar et al., 2014).

Dalam praktiknya, *financial sustainability* berkaitan erat dengan stabilitas fiskal pemerintah daerah (Andrews, 2015). Kondisi keuangan yang sehat ditandai oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran serta meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Andrews, 2015). Keberhasilan dalam mempertahankan stabilitas fiskal memungkinkan pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik secara berkesinambungan tanpa menimbulkan beban fiskal berlebih bagi masyarakat pada periode berikutnya (Andrews, 2015).

Beberapa faktor memengaruhi *financial sustainability* pemerintah daerah, antara lain efisiensi anggaran, tingkat kemandirian keuangan, tingkat utang daerah, dan solvabilitas anggaran (Mikesell, 2011). Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome pembangunan yang maksimal (Musgrave & Musgrave, 1989). Tingkat efisiensi yang rendah mengindikasikan adanya pemborosan anggaran dan ketidaktepatan alokasi yang dapat melemahkan keberlanjutan fiskal (Musgrave & Musgrave, 1989). Sebaliknya, efisiensi anggaran yang tinggi memperbesar peluang pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskalnya dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik (Andrews, 2015).

Selain efisiensi anggaran, tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan *financial sustainability* (Halim, 2012). Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan layanan publik dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2012). Tingkat kemandirian fiskal umumnya diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana rasio yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih mandiri (Halim, 2012).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *financial sustainability* adalah tingkat utang daerah (PP No. 30 Tahun 2011). Utang daerah merupakan instrumen pembiayaan pembangunan yang diperbolehkan sepanjang dikelola secara hati-hati, akuntabel, dan tidak menimbulkan risiko fiskal berlebihan (PP No. 30 Tahun 2011). Pengaturan mengenai utang daerah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 sebagai upaya menjaga disiplin fiskal daerah (PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 2011).

Selain utang, solvabilitas anggaran menjadi indikator penting dalam menilai *financial sustainability* pemerintah daerah (Marlowe et al., 2009). Solvabilitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka panjang dengan sumber daya yang tersedia (Marlowe et al., 2009). Tingkat solvabilitas yang rendah menunjukkan kerentanan fiskal yang dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan publik (Marlowe et al., 2009).

Pemerintah daerah juga menghadapi kewajiban kontinjensi yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal (Cebotari et al., 2009). Kewajiban kontinjensi dapat muncul akibat gugatan hukum, jaminan proyek infrastruktur, atau kegagalan BUMD yang memperoleh dukungan fiskal (Cebotari et al., 2009). Apabila tidak dikelola secara memadai, kewajiban ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menimbulkan beban keuangan bagi generasi mendatang (Cebotari et al., 2009).

Konteks Provinsi Kalimantan Barat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika *financial sustainability* antar kabupaten dan kota (BPS Kalimantan Barat, 2023). Terdapat 14 kabupaten dan kota dengan karakteristik fiskal, geografis, dan demografis yang berbeda-beda (BPS Kalimantan Barat, 2023). Perbedaan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuka peluang analisis mengenai pengaruh efisiensi anggaran, kemandirian fiskal, utang, solvabilitas anggaran, dan kewajiban kontinjensi terhadap *financial sustainability* (Mikesell, 2011).

Penelitian mengenai faktor-faktor tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Mikesell, 2011). Pemahaman yang komprehensif atas determinan *financial sustainability* memungkinkan pemerintah daerah merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi jangka panjang (Andrews, 2015).

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori ekonomi publik dan pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi hasil (Musgrave & Musgrave, 1989). Prinsip tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah (IFAC, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efisiensi anggaran berpengaruh terhadap *financial sustainability.*

2. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial sustainability.*
3. Apakah tingkat utang berpengaruh terhadap *financial sustainability*.
4. Apakah solvabilitas anggaran berpengaruh terhadap *financial sustainability*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh efisiensi anggaran terhadap *financial sustainability*.
2. Pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial sustainability*.
3. Pengaruh tingkat utang terhadap *financial sustainability*.
4. Pengaruh solvabilitas anggaran terhadap *financial sustainability*.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi *financial sustainability* pada pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pijakan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena serupa, sehingga dapat memperkaya literatur dan memperluas pemahaman akademis dalam bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan maupun rekomendasi dalam menilai sejauh mana variabel efektifitas anggaran, kemandirian keuangan, tingkat utang, serta solvabilitas anggaran berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Dengan adanya pemahaman tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan, strategi, maupun regulasi yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.